

PERTEMUAN PANEL TINGKAT TINGGI UNTUK AGENDA PEMBANGUNAN PASCA-2015

Sita Hidriyah*)



Abstrak

Pada tahun 2015, target pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) akan berakhir. Dalam pencapaiannya, tantangan-tantangan baru bermunculan seperti perubahan iklim, ketahanan pangan dan lain-lain. Untuk menghadapinya, negara-negara anggota PBB telah bersepakat untuk berupaya mencapai target pada tahun 2015 dan membahas bersama agenda pembangunan pasca-2015. Oleh karena itu, Sekjen PBB membentuk High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda (HLPEP). HLPEP dibentuk sebagai wujud inisiasi upaya persiapan agenda pembangunan pasca-2015 dan pada 24–27 Maret 2013 melaksanakan Pertemuan Tingkat Tinggi di Bali untuk mempersiapkan laporan yang akan diserahkan kepada Sekjen PBB pada akhir Mei 2013. Mengingat laporan akhir HLPEP merupakan produk konsensus antaranggota Panel, pertemuan ini akan memainkan peran yang krusial untuk memfasilitasi konsensus dimaksud.

A. Pendahuluan

Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan negara maju. Negara-negara berkembang berkewajiban melaksanakannya, termasuk Indonesia, di mana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan *monitoring* MDGs. Sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani MDGs, juga berkomitmen mewujudkan 8 MDGs sebagai perwujudan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas hidup yang lebih baik. Secara nasional, komitmen tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan nasional, antara lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009, yang dipertegas pada RPJMN 2010–2014 dan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan.

*) Peneliti Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sita.hidriyah@dpr.go.id



Pada tahun 2015, target capaian MDGs akan berakhir. Sejak tahun 2000 sampai saat ini, sejumlah target telah berhasil dicapai, seperti target pengurangan kemiskinan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, peningkatan kesehatan anak, perluasan akses air bersih dan pengendalian penyebaran penyakit menular. Namun tantangan-tantangan baru bagi pembangunan juga bermunculan, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, degradasi laut, urbanisasi dan lain-lain. Menghadapi hal tersebut, negara-negara anggota PBB telah sepakat untuk semaksimal mungkin berupaya mencapai target MDGs pada tahun 2015 dan mulai membicarakan perlunya pembahasan agenda pembangunan pasca-2015.

B. Pencapaian Menuju MDGs 2015

MDGs atau Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global yang hadir sebagai tindak lanjut Deklarasi Milenium dan dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tanggal 18 September 2000, (*A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals*). Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan. Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam delapan tujuan yang mencakup kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kemitraan global. MDGs yang akan berakhir tahun 2015 memiliki delapan sasaran yakni pengentasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, pemerataan pendidikan dasar, mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria,

dan penyakit lain, menjamin daya dukung lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Pada bulan September tahun 2010, KTT MDGs di New York telah memberikan mandat kepada Sekjen PBB Ban Ki Moon untuk menginisiasi upaya persiapan agenda pembangunan pasca-2015 sekaligus memilih Panel Tinggi PBB atau *High-Level Panel (HLP)* untuk merumuskan program penggantinya. Sebagai tindak lanjut, Sekjen PBB pada bulan Juli 2012 mengumumkan 27 anggota *High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda* atau Panel Tingkat Tinggi dari Tokoh-tokoh dunia terkemuka untuk memberikan saran tentang kerangka pembangunan global setelah tahun 2015, yang merupakan target MDG Award 2012. Panel ini diketuai bersama (co-Chairs) oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, dan Perdana Menteri Inggris, David Cameron. Panel mencakup 26 anggota *eminent persons* (tokoh terkemuka) dari pemerintahan, sektor swasta, akademisi, civil society dan pemuda, serta berdasarkan keseimbangan geografis dan gender.

Tujuan HLPEP adalah memberikan saran serta rekomendasi kepada Sekjen PBB mengenai visi dalam mengatasi tantangan pembangunan global. HLP juga akan ditugaskan untuk menyusun laporan kepada Sekjen PBB yang memuat rekomendasi terkait visi dan bentuk agenda pembangunan pasca-2015 yang tegas dan lantang namun mudah dicapai. Menurut rencana, Laporan HLPEP tersebut akan diserahkan kepada Sekjen PBB pada akhir Mei 2013. Laporan HLPEP akan menjadi masukan kunci bagi laporan Sekjen PBB kepada Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September 2013.

C. Perkembangan HLPEP

HLPEP telah bertemu sebanyak tiga kali, yaitu di New York (25 September 2012) yang membahas tentang visi agenda pembangunan pasca-2015, London (1 November 2012) yang membahas masalah kemiskinan di tingkat individual dan rumah tangga serta di Monrovia, Liberia (1 Februari 2013) yang dihadiri Presiden

SBY, Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf, dan PM Inggris David Cameron. Dalam pertemuan terakhir, Presiden SBY mengungkapkan RI menawarkan tiga alternatif bentuk agenda pembangunan pasca-2015, yaitu menggunakan kerangka MDGs dengan penajaman tertentu, menambah target-target baru, dan perombakan total terhadap MDGs. Namun, Presiden SBY menyarankan untuk menghindari alternatif ketiga karena banyak negara bekerja keras untuk memenuhi target MDGs. Perombakan total terhadap MDGs dapat memicu kebingungan dan diskontinuitas terhadap apa yang selama ini telah dibangun. Selain itu, jika opsi ini yang dipilih akan terjadi kebingungan dan diskontinuitas. Presiden SBY telah mengidentifikasi adanya tiga kelompok pemikiran terkait tindak lanjut komitmen MDGs. Pertama adalah mengadopsi MDGs sebagaimana yang ada dengan memperkuatnya. Kedua, melanjutkan sasaran MDGs dan mengidentifikasi target-target baru, dan ketiga adalah menyusun target pembangunan baru untuk agenda pasca-2015. Terlepas dari ketiga pemikiran yang berkembang ini, Presiden berpandangan bahwa MDGs telah banyak membawa kemanfaatan, dan oleh karena itu apa yang telah dicapai selama ini perlu dilanjutkan dan diperkuat. Bila dianggap perlu, dapat ditambahkan beberapa target pembangunan baru.

Hasil dari pertemuan tersebut, atau yang disebut sebagai “Komunike Monrovia” berisi ringkasan jalannya pertemuan untuk keperluan *outreach* dan transparansi publik yang menggarisbawahi agenda global pembangunan pasca-2015 yang berorientasi pada manusia dan sensitif terhadap tantangan universal abad 21, yaitu memajukan pembangunan berkesinambungan, mendukung pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, melindungi lingkungan, dan mewujudkan perdamaian, keamanan, keadilan, kebebasan dan kesetaraan di semua tingkat. Komunike juga menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan perwujudan kesejahteraan merupakan visi dan tanggung jawab bersama. Upaya pencapaian target MDGs tahun 2015 wajib dikerahkan, namun tetap harus membentuk kerangka kerja tunggal pembangunan 2015 yang kohesif, dan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. Isu

tersebut dibahas pada pertemuan HLPEP ke-4 di Bali pada 24–27 Maret 2013, sekaligus untuk membahas pengentasan kemiskinan melalui kemitraan global dan *means of implementation* dan menuntaskan isu-isu lain sebelum rekomendasi akhir panel disampaikan kepada Sekjen PBB bulan Mei 2013. Tantangan utama saat ini adalah melakukan prioritas berbagai isu yang perlu dimasukkan dalam agenda pembangunan pasca 2015. Mengingat waktu penyerahan laporan sudah dekat, maka pertemuan di Bali akan memainkan peran yang krusial dalam proses penyelesaian laporan dimaksud.

D. Indonesia dan Pertemuan HLPEP

Dalam pertemuan HLPEP di Bali Maret ini, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan *stakeholders* dalam *Outreach Meeting*, yaitu Publik, Sektor Swasta, Akademik dan Lembaga Penelitian, Pemuda dan LSM. *Outreach Meeting* tersebut diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2013 untuk mendiskusikan rekomendasi agenda pembangunan pasca-2015 sesuai dengan garis program yang sedang dikembangkan berdasarkan poin penjangkauan fokus dari pemerintah Indonesia, Sekretariat Panel Tingkat Tinggi dan Kantor Eksekutif Sekretaris Jenderal. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada HLPEP dalam merekomendasikan kerangka pengembangan selanjutnya setelah tahun 2015.

Bersamaan dengan sidang HLPEP, *Asia Pacific United Nations Millennium Campaign* (UNMC) menyelenggarakan *Asia Pacific Regional Parliamentarian and CSO Forum on MDGs Acceleration and The Post 2015 Development Agenda* di Bali pada tanggal 24–26 Maret 2013. UNMC sejak 2012 telah meluncurkan program *Parliamentarian Forum on the MDGs Acceleration and Post 2015 Agenda* sebagai dukungan atas program-program MDGs. Adapun sasaran utama dari forum tersebut adalah mengidentifikasi hal-hal penting dari pengalaman MDGs, mengidentifikasi dan menyepakati isi-isu prioritas, prinsip-prinsip dasar dan kritik membangun serta membahas unsur-unsur inti dari kemitraan global bagi pembangunan. Adapun peserta dari forum tersebut adalah

beberapa anggota parlemen dari negara-negara Asia-Pasifik. Indonesia telah memilih beberapa anggota parlemennya untuk berpartisipasi dan ikut memberikan pernyataan akan pencapaian MDGs beserta solusi ataupun *input* yang dapat diberikan untuk pencapaian MDGs dan agenda pembangunan pasca-2015.

Posisi Indonesia kini sudah dipandang dalam kegiatan percaturan Internasional. Dalam pertemuan terakhir di Monrovia, Indonesia mengambil posisi menghindari perombakan total terhadap *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai bentuk agenda pembangunan pasca-2025. Indonesia juga sudah dipercaya menjadi tempat pertemuan-pertemuan dunia bergengsi seperti HLPEP pada tanggal 25–27 Maret 2013 di Bali. Selain itu, pada bulan November 2013 mendatang, Indonesia akan dipercaya menjadi Ketua APEC yang dikukuhkan dalam pertemuan tingkat dunia yang rencananya akan diselenggarakan di kota Denpasar.

E. Penutup

Pemerintah telah mengklaim jika 8 target MDGs hampir semuanya tercapai. Namun sayang, tidak semua pihak mendukung klaim itu. Sejumlah organisasi massa menyatakan jika pencapaian MDGs gagal bahkan belum tercapai. Ini seiring meningkatnya kemiskinan, tidak adanya akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan dasar, ketahanan pangan, dan kerusakan lingkungan serta konflik agraria. Akses untuk ketahanan pangan dan kesehatan masih dinilai sangat mahal, sedangkan perampasan tanah meningkat signifikan seiring biaya hidup yang tinggi. Secara global tujuan MDGs memang terlaksana dan tercapai secara baik. Namun pada tingkat nasional, tujuan tersebut masih membutuhkan kerja keras dan partisipasi serta kerjasama dari berbagai pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keseriusan itu hendaknya diimplementasikan dengan mengintegrasikannya dalam program-program daerah sesuai acuan program pembangunan nasional, sehingga pada tahun 2015 mendatang, keseluruhan tujuan MDGs bisa dicapai sesuai target.

Pembahasan HLPEP di Bali sejatinya merupakan mata rangkaian dari serangkaian pembahasan Panel Tingkat Tinggi sebelumnya.

Hal-hal yang belum tuntas pada pertemuan sebelumnya akan dituntaskan di pertemuan terakhir ini. Presiden SBY juga berharap jika persoalan mengenai agenda pembangunan pasca 2025 bisa dibicarakan lebih lanjut pada pertemuan HLPEP Bali. HLPEP kali ini juga akan memunculkan Komunike Bali yang akan mencerminkan jalannya pembahasan pertemuan dan langkah-langkah bagi pencapaian agenda pembangunan pasca-2015. Agenda pembangunan pasca-2015 kiranya dapat jelas, fokus, ringkas, transparan dan terukur. Selain itu, mengatasi ketidakmerataan pembangunan melalui *sustainable-growth with equity*, memperhatikan perbedaan kapasitas dan tingkat pembangunan antarnegara serta menjawab tantangan-tantangan baru. Sementara hasil-hasil yang diharapkan dari *Asia Pacific Regional Parliamentarian and CSO Forum on MDGs Acceleration and The Post 2015 Development Agenda* diharapkan dapat memberikan keberhasilan atas tantangan MDGs serta kebijakan dan program mempercepat kemajuan, adanya kemitraan, jaringan dan kesepakatan strategis serta menguraikan isu-isu penting untuk dimasukkan ke pertemuan HLPEP. Pencapaian tujuan dan target MDGs bukanlah semata tugas pemerintah. Tetapi, tugas seluruh komponen bangsa. Sehingga, pencapaian tujuan dan target MDGs harus menjadi pembahasan seluruh masyarakat

Rujukan:

1. "Cameron to Attend Bali Meeting Remotely," *The Jakarta Post*, 21 Maret 2013.
2. "High Level Pannel Siap Digelar Di Bali," <http://www.depkeu.go.id>, diakses 22 Maret 2013.
3. "Millennium Development Goals," <http://mdgs-dev.bps.go.id/main.php?link=home>, diakses 20 Maret 2013.
4. "Partisipasi Lawan Kemiskinan," <http://internasional.kompas.com>, diakses 20 Maret 2013.
5. "Presiden: Ubah Paradigma Kemiskinan," *Kompas*, 20 Februari 2013.
6. "SBY Pimpin Panel Tingkat Tinggi ke-4 PBB di Bali 25–27 Maret," <http://news.liputan6.com>, diakses 20 Maret 2013.